EPP

EDUCATIONAL POLICY AND PLANNING PROJECT

A GOVERNMENT OF INDONESIA - USAID PROJECT

Policy Review of the Primary and Junior Secondary Education Sub-Sectors in South Sulawesi

Pengkajian Kebijakan Subsektor Pendidikan Sd Dan SMP Di Propinsi Sulawesi Selatan

(Suatu Rekomendasi)

oleh:
Tim Sulawesi Selatan

Pusat Informatika Balitbang Dikbud | Center for Informatics Office of Educational and Cultural Research and Development

DEPARTMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Jakarta, Indonesia

PREFACE

The Educational Policy and Planning (EPP) Project is a seven year project conducted jointly by the Indonesia Ministry of Education (MOEC) and the United States Agency for International Development (USAID). The overall project objective is to improve the quality of education in Indonesia by assisting the MOEC, through the Office of Educational and Cultural Research and Development (Balitbang Dikbud), to formulate better policies and long-term plans. The project aims to improve policy formulation and long-term planning by improving the timeliness, relevance and accuracy of educational data collection, the subsequent analyses of such data, and their ultimate use for policy and decisionmaking.

There are three major components of the EPP Project: (1) development of an integrated management informations system (MIS) within the MOEC, (2) enhancement of MOEC policy research and analysis capacity, and (3) support for MOEC institutional development at the national and provincial level through training and technical assistance. EPP technical advisory staff work closely with counterpart Indonesian staff as part of a collaborative process of developing institutional capacity.

Dr. Boediono
Head, Center for Informatics
Office of Educational and Cultural Research and Development
Department of Education and Culture
Republic of Indonesia

The EPP Project in collaboration with the USAID Improving the Efficiency of Educational Systems (IEES) Project, publishes EPP documents in order to disseminate this knowledge and extend its usefulness. EPP has carried out a series of policy studies designed to provide answers to key questions facing Indonesian educators. These include:

The Quality of Basic Education
The Quality and Efficiency of Vocational/Technical Education
The Strengthening of Local Education Capacity
Developing Indicators of Educational Efficiency
Teacher Education Issues
Curriculum Reform and Textbook Production
Education, Economic, and Social Development

This series has been planned under the direction of Moegiadi, Balitbang Dikbud, and Boediono, Center for Informatics, Balitbang Dikbud and Simon Ju, EPP Chief of Party.

Editors for the series are Abas Gozali, Reta Hendrati Dewi, Center for Informatics, and Jerry Messec, IEES, Florida State University.

Daftar Isi

I. KAJIAN/ANALISIS 1

II. REKOMENDASI 13

KAJIAN/ANALISIS KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DI PROPINSI JAWA BARAT, JAWA TIMUR, DAN SULAWESI SELATAN

1. Latar belakang kegiatan

Laporan Kajian/Analisis Kebijaksanaan Pendidikan (Policy Analysis) ini adalah hasil suatu kajian terhadap kondisi pendidikan, permasalahannya, kaitan dengan sektor-sektor lain, kendala dan tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan rekomendasi kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Kajian ini dilakukan di 3 (tiga) propinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan oleh Tim yang berbeda-beda dan dengan metode dan prosedur pengkajian yang sama, yaitu metode Analisis Kebijaksanaan Pendidikan yang komprenhensif dan sistematik, yang diperkenalkan oleh IEES (Improving the Efficiency of Educational Systems), suatu konsorsium yang dibiayai oleh USAID.

Konsorsium tersebut terdiri dari beberapa lembaga yaitu Florida State University, Howard University, Institute for International Research, dan State University of New York di Albany.

Kegiatan Analisis Kebijaksanaan ini telah dilakukan di 9 negara yaitu Ethiopia, Nepal, Haiti, Botswana, Liberia, Somalia, Republik Arab Yaman, dan Nigeria. Di Indonesia kegiatan ini dimulai pada tahun 1986 dengan ruang lingkup nasional dan unit utama yang diserahi sebagai mitra kerjanya adalah Balitbang Dikbud, Depdikbud.

Tahun 1991/1992 ini, metode dan prosedur Analisis Kebijaksanaan Pendidikan dicobakan pada ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu tingkat propinsi, dan meliputi Jabar, Jatim dan Sulsel. Dalam mencobakan metode dan prosedur Analisis Kebijaksanaan ini dipakai pendekatan "belajar sambil bekerja/ learning by doing". Tiga kali Lokakarya Pelatihan telah dilakukan yaitu pada bulan Januari 1991, Agustus 1991, dan Februari 1991 ini adalah lokakarya Pelatihan ke-III dan saat ini adalah seminar pembahasan hasil kerja tim dari setiap propinsi.

Diantara setiap Lokakarya Pelatihan tersebut (antara Januari 1991 - Agustus 1991 dan antara Agustus 1991 - Februari 1992) Tim Analisis dari setiap propinsi melakukan kegiatan lapangan berupa mengumpulkan data/ informasi, baik dari dokumentasi maupun wawancara dengan para pejabat, pemuka masyarakat, dan nara sumber lainnya. Kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut dan menuliskan laporan akhir.

Mengapa analisis kebijaksanaan sektor pendidikan ini dimulai di tiga propinsi tersebut adalah karena ketiga

propinsi tersebut dinilai paling aktif dalam kegiatan Jaringan Penelitiannya (JARLIT). JARLIT adalah suatu kerjasama di bidang penelitian pendidikan antara sesama unit/lembaga pemakai/pengguna hasil penelitian dengan unit/lembaga yang berfungsi melakukan penelitian, baik antar pusat dan daerah maupun antar sesama lembaga/unit di daerah. Sampai saat ini telah dibentuk Jarlit di 9 propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Irian Jaya, Sulawesi Utara, D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Direncanakan pada tahun 1992/1993 akan dilakukan juga kegiatan yang sama untuk beberapa propinsi lainnya di luar ketiga propinsi yang sekarang sedang berseminar.

Kegiatan Analisis Kebijaksanaan Pendidikan ini sejak awal telah menetapkan untuk mengkaji tingkat Pendidikan Dasar saja (SD dan SLTP). Alasan pemilihan fokus analisis pada pendidikan dasar (SD dan SLTP) adalah karena dalam Repelita V, program peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan perluasan kesempatan belajar SLTP (Perintisan Wajib Belajar SLTP) merupakan program yang diprioritaskan. Diharapkan kegiatan serupa untuk tingkat Sekolah Menengah dapat dilakukan oleh masing-masing propinsi secara mandiri.

2. Tujuan Seeminar

Dari seminar ini diharapkan:

1. Ada diskusi dan pembahasan yang tajam antara para analis (pengkaji) dan para pengambil keputusan di tingkat daerah

(Ketua Bappeda dan Ka Kanwil) tentang permasalahan pendidikan di daerah masing-masing, dan bentuk kebijaksanaan yang perlu diambil untuk mengatasinya dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi.

2. Ada suatu daftar prioritas rekomendasi kebijaksanaan di bidang pendidikan dari setiap propinsi yang akan ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan di masing-masing propinsi, terutama untuk jangka pendek dan jangka menengah.

3. Tujuan Kegiatan Pengkajian

Pengkajian sektor atau sub-sektor pendidikan adalah suatu langkah permulaan dalam analisis kebijaksanaan. Seperti umumnya bentuk-bentuk evaluasi, analisis semacam itu adalah pemikiran yang terbaik bagi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung yang dirancang untuk menyediakan suatu aliran informasi yang teratur tentang efektivitas struktur organisasi, peraturan-peraturan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan alokasi sumber antar dan dalam sub-sektor.

Tujuan analisis kebijaksanaan tingkat propinsi yang diselenggarakan ini adalah:

1. Untuk mengenal masalah-masalah yang paling mendesak dalam peningkatan kualitas sekolah dasar dan perluasan sekolah menengah tingkat pertama;

2. Sebagai sarana pelatihan bagi para analis kebijaksanaan pendidikan di tiga propinsi. Peserta dalam analisis kebijaksanaan ini ditarik dari kantor Bappeda, IKIP, Universitas, IAIN, dan Kantor Wilayah Depdikbud dan Depag. Staf Balitbang bertindak sebagai nara sumber bagi anggota Tim Propinsi.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Analisis kebijaksanaan dari sub sektor SD dan SLTP di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan adalah memutakhirkan/meremajakan dan memperluas analisis kebijaksanan pendidikan tingkat nasional yang dikerjakan tahun 1986. Tim Propinsi mengumpulkan data tentang keadaan subsektor SD dan SLTP dibandingkan dengan tujuan dan target propinsi dan nasional. Data tersebut kemudian dipakai untuk mengenal masalah-masalah efisiensi dan keadilan/pemerataan dalam hubungannya dengan struktur organisasi dan peraturan-peraturan yang berlaku sekarang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan alokasi sumber-sumber.

Ketiga lokakarya pelatihan dipakai untuk menyampaikan pendekatan dan metode-metode analisis umum yang diperlukan dalam pengkajian sektor pendidikan. Oleh sebab itu ketiga tim mengumpulkan jenis-jenis data yang sama dan memakai data tersebut dalam bentuk-bentuk analisis yang sama.

Seperti dijelaskan terdahulu, setiap propinsi mempunyai Tim Analisis yang bekerja secara bebas untuk propinsi mereka, dengan data dari propinsi yang bersangkutan dan nara sumber daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap laporan, menggambarkan keunikan kondisi setiap propinsi. Di samping itu, topik-topik/issue-issue yang umum dan rekomendasi yang disajikan menunjukkan ketiga propinsi memiliki sejumlah permasalahan yang sama.

5. Temuan dan Rekomendasi

1) Perubahan struktur kerangka kerja Administrasi dan Pengendalian

Hasil-hasil analisis propinsi memperkenalkan beberapa issue yang berhubungan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan struktur administrasi dan pengendalian/pembinaan. Adanya wewenang dan pengendalian pada beberapa instansi adalah pusat dari semua pemikiran-pemikiran ini. Misalnya, manajemen ganda SD oleh Depdikbud dan Depdagri dan manajemen sekolah-sekolah M.I./M.Ts. oleh Depag dilihat sebagai sumber permasalahan.

Beberapa permasalahan tersebut jelas merupakan urusan tingkat nasional karena kebijaksanaan dan struktur ditentukan oleh pemerintah pusat. Walaupun demikian, manajemen ganda ditingkat daerah dikenal sebagai masalah

juga. Misalnya tindakan-tindakan pejabat daerah yang dapat (sewaktu-waktu) menugaskan siswa dan guru-guru untuk kegiatan-kegiatan non-sekolah. Hal ini menimbulkan hilangnya waktu bagi proses belajar-mengajar. Struktur manajemen ganda dilaporkan juga sebagai memperlemah kemampuan para administrator lokal untuk mengendalikan atau mendisiplinkan guru.

Issue wewenang dan manajemen pendidikan ini mengkait pada efisiensi dan efektivitas dari sekolah-sekolah. Laporan-laporan hasil analisis menyimpulkan bahwa manajemen ganda oleh Depdikbud dan Depdagri terhadap SD menimbulkan ketidakefisienan sebagai hasil dari usaha yang tumpang-tindih. Sumber-sumber daya yang dipakai dalam struktur administrasi yang tumpang tindih, dapat - menurut alasan para analis - lebih bermanfaat dipakai langsung oleh sekolah. Tambahan pula, tempat pengambilan keputusan yang ganda dapat menimbulkan ketidaktentuan yang sangat dalam pada administrator lokal, meningkatkan volume pekerjaan mereka, dan memperlemah wewenang mereka sendiri. Wewenang yang bertambah lemah pada administrator lokal akan mengurangi kemampuan mereka dalam membina dan mengarahkan sekolah agar lebih efisien dan efektif.

Laporan-laporan tersebut menemukan masalah-masalah spesific dikaitkan pada kemampuan administrator lokal untuk mengendalikan dan mengarahkan sekolah-sekolah. Pertama-tama menurunnya kemampuan menugaskan, memotivasi, atau

mendisiplinkan guru-guru. Efektivitas dari guru-guru adalah sentral dari keseluruhan efektivitas sekolah. Karena struktur administrasi dan manajemen yang sedang berlangsung, administrator lokal hanya mengurangi kemampuan yang terbatas untuk mempengaruhi penugasan guru-guru atau pembinaan kariernya. Hal ini menghilangkan dua dari alat motivasi yang paling efektif dari pengendalian administrator.

Masalah yang kedua menyangkut pengaruh dari pejabat-pejabat lokal lain dalam kegiatan sekolah. Jika pejabat-pejabat ini dapat dapat menyimpangkan tugas-tugas utama siswa dan guru-guru, kehilangan waktu belajar dapat secara serius menurunkan efektivitas dari sekolah-sekolah.

Efektivitas sekolah-sekolah M.I./M.Ts. juga menjadi suatu pemikiran/perhatian para pejabat-pejabat pendidikan. Ada pembuktian di dalam laporan analisis bahwa sekolah-sekolah M.I./M.Ts. mungkin tidak mempunyai sumber-sumber yang memadai atau tidak melaksanakan pendidikan seperti standar Depdikbud. Para pejabat pendidikan di daerah mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk ikut dalam peningkatan sekolah-sekolah M.I./M.Ts. karena mereka ada di bawah Depag. Laporan-laporan tersebut membicarakan perubahan-perubahan dalam pengaturan administrasi dan pengendalian untuk meningkatkan koordinasi antara Depdikbud dan Depag dalam hal kualitas MI/MTs.

2) Pengumpulan secara sistematik dan penerbitan data pendapatan dan pengeluaran sekolah.

Ketiga studi tingkat propinsi tersebut mengemukakan tidak adanya informasi tentang biaya yang valid dan dapat dipercaya. Tidak adanya informasi tersebut sangat penting mengingat tugas untuk perluasan SLTP secara cepat. Jika perluasan tersebut ingin dilakukan tanpa menurunkan kualitas secara serius atau memperburuk ketidakadilan yang sedang berlangsung, maka suatu sistem pembukuan yang memungkinkan melakukan analisis secara penuh dan luas tentang efisiensi dan keadilan/pemerataan perlu dikembangkan. Ketiga laporan propinsi merekomendasikan untuk menciptakan sistem pembukuan tersebut dan monitoring yang ketat dari sistem tersebut.

3) Meningkatkan Sistem Pengadaan Guru untuk SD dan SLTP

Studi nasional dan studi ketiga propinsi tersebut mencatat fakta-fakta bahwa penyebaran guru SD dan SLTP sangat jelek. Beberapa sekolah mempunyai guru lebih banyak dari yang diperlukan, sedang yang lainnya kekurangan guru. Pada tingkat SLTP masalah pengadaan guru lebih rumit dengan timbulnya kekurangan guru hampir untuk semua bidang studi. Kekurangan guru bidang studi ini tampaknya menghambat perluasan SLTP. Laporan ketiga propinsi merekomendasikan untuk memberikan insentif untuk menarik guru-guru ke daerah

yang terpencil atau pada sekolah-sekolah yang tidak terkenal.

4) Meningkatkan kesinambungan SD dan SMP

Dalam setiap laporan analisis propinsi tersebut ada suatu pemikiran tentang kurangnya kesinambungan antara pendidikan di SD dengan SMP. Perhatian tersebut meluas di luar kurikulum karena kurikulum sedang direvisi. Pemikiran ditujukan pada perbedaan penjadwalan sekolah, perbedaan standar dari guru-guru (bidang studi umu dan bidang studi khusus) dan ketidak-pastian tentang mekanisme promosi dari SD ke SMP. Rekomendasi dari propinsi beraneka ragam, tetapi pertanyaan umum adalah meminta penjelasan yang lebih operasional tentang arti penyatuan SD dan SMP dalam Pendidikan Dasar.

5) Menjamin bahwa kurikulum lokal sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal

Laporan analisis kebijakan Jawa Barat dan Jawa Timur menekankan perlunya memperhatikan isi kurikulum lokal. Mereka berpendapat bahwa waktu yang dialokasikan untuk kurikulum lokal sebaiknya mempersiapkan siswa untuk pasaran tenaga kerja lokal. Disarankan agar keputusan tentang apa muatan lokal tersebut haruslah ditetapkan di tingkat

sekolah bersama-sama dengan orangtua dan pemimpin masyarakat.

6) Memperbaiki sistem pengadaan textbook

Di Sulawesi Selatan, kenyataan 1 textbook digunakan untuk tiap 19 atau 20 siswa, sedangkan rasio buku pegangan terhadap guru adalah 1 dibanding 9 pada tingkat sekolah dasar, dan 1 dibanding 12 pada tingkat sekolah menengah. Ditambah lagi textsbook yang didistribusikan sering datang terlambat. Dengan menunjukkan pentingnya pengadaan textbook dan buku pegangan guru terhadap kemampuan muris/siswa (student performance), ada kebutuhan mendesak dalam menciptakan mekanisme untuk mengontrol dan memonitor pendistribusian textbook.

7) Memperluas pelaksanaan CBSA

Evaluasi mengenai CBSA telah menunjukkan kesuksesan CBSA dalam memperbaiki kemampuan guru maupun murid. Sulawesi Selatan dan Jawa Timur merekomendasikan bahwa lebih banyak lagi guru yang harus ditraining/dilatih dalam metode CBSA, dan juga perluasan program harus dilaksanakan untuk mengimbangi suply guru yang telah dilatih dan fasilitas yang memadai.

8) Memperbaiki angka partisipasi murid

Selain rasio enrolment yang tinggi, ketiga propinsi menunjukkan/memberikan perhatian khusus pada partisipasi murid yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil. Disarankan adanya penelitian untuk menentukan penyebab-penyebab berkurangnya jumlah enrolmen di beberapa daerah baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Dalam waktu yang bersamaan, disarankan pula adanya pemetaan sekolah yang terpencil untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam rangka merencanakan sekolah baru, memperluas fasilitas atau menyelenggarakan program sekolah menengah terbuka.

REKOMENDASI

Rekomendasi 1: Peningkatan jumlah tamatan SD yang melanjutkan belajar ke SMTP atau ke SKB dan tamatan SMTP yang melanjutkan ke SMTA.

a. Masalah:

1) Tamatan SD yang tidak melanjutkan belajar ke SMTP masih cukup banyak 49.851 (35,72%). (Tabel 1)
   Tempat yang belum terisi di kelas satu SMTP masih 6.179 Tetapi jika seemua tamatan melanjutkan ke SLTP, maka masih perlu disediakan ruang kelas baru sebanyak 1.092 atau 364 gedung sekolah baru.
2) Tamatan SMTP yang tidak melanjutkan ke SMTA masih cukup banyak, yaitu 25.681 (30,55%). (Tabel 1)
   Tempat yang belum terisi di kelas satu SMTA masih sebanyak 2.670. Teetapi jika semua tamatan melanjutkan ke SMTA, maka masih perlu disediakan ruang kelas baru seebanyak 575 atau 192 gedung sekolah baru. (Tabel 1)

b. Pemecahan:

1) Merancang suatu program kegiatan penyuluhan bagi orangtua oleh Tim Gabungan (PKK, DIKMAS, BKKBN dan instansi terkait lainnya yang dikoordinasikan oleh Kanwil Depdikbud mengenai wajib belajar 9 (sembilan)

tahun, agar orangtua memberi kesempatan dan mendorong anaknya untuk lanjut belajar ke SMTP/SMTA atau ke SKB.

2) IKIP UPG dapat memikirkan yaitu menyediakan program khusus yang memberikan pelayanan kepada orangtua/masyarakat tentang pembinaan anak.

3) Gerakan penyuluhan masal tentang wajib belajar melalui masmedia.

4) Diadakan penelitian pelacakan lulusan yang tidak lanjut belajar.

Rekomendasi 2: Peningkatan pelaksanaan EBTANAS

a. Masalah:

Banyak sekolah (SD dan SMP) yang pada tiga tahun terakhir ini NEM nya tidak mencerminkan perolehan yang sebenarnya. Umumnya dari sekolah-sekolah di pinggiran kota, sekolah swasta dan di pedesaan, sehingga NEM sulit dijadikan sebagai tolok ukur kualitas yang obyektif. (Gambar 1)

b. Pemecahan:

Supaya pemeriksaan hasil ujian diawasi secara ketat oleh unit Kanwil Depdikbud untuk SMP.

Rekomendasi 3: Penggunaan Jam Belajar Efektif

a. Masalah:

Jam belajar efektif di sekolah-sekolah (terutama di pedesaan) ssi dengan jadwal tak terisi sepenuhnya. Sebab kurang kedisiplinan guru dan adanya kegiatan non kurikuler yang mengganggu kegiatan belajar terjadwal murid di sekolah.

Hal tersebut mengganggu pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa.

b. Pemecahan:

1) Perlu adanya Surat Edaran Gubernur yang melarang murid dan guru melaksanakan kegiatan non kurikuler yang diinstruksikan oleh penguasa setempat selama jam belajar.
2) Perlu ada studi khusus mengenai penggunaan jam belajar efektif di sekolah dengan sampel yang memadai.

Rekomendasi 4: Peningkatan penyediaan dan perbaikan pendistribusian buku paket siswa dan buku pedoman guru di SD dan SMP.

a. Masalah:

1) Penyediaan buku paket belajar siswa di SD dan di SMP demikian pula buku pedoman guru masih kurang, menurut jenis maupun jumlahnya. Rasio murid buku paket pada SD = 20:1 SMP = 19:1. Rasio guru dengan buku pegangan guru di SD + 9:1 dan SMP + 12 : 1 (lihat tabel 2 dan 4).
2) Pendistribusian buku-buku tersebut sering tidak lancar.

b. Pemecahan:

1) Pemerintah supaya meningkatkan jumlah exsemplar buku paket sesuai dengan yang dibutuhkan.
2) Hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dalam pendistribusian buku dari propinsi sampai di sekolah perlu diatasi.

Rekomendasi 5: Peningkatan pelaksanaan CBSA di SD sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan.

a. Masalah:

1) Pemahaman guru dan Kepala SD sebagai konsep CBSA masih kurang.
2) Pelaksanaan CBSA pada SD belum merata pada semua sekolah ssi dengan kondisi sekolah dan lingkungan.

b. Pemecahan:

1) Penataran CBSA yaitu guru dan Kepala Sekolah supaya diperluas dan ditingkatkan pada sekolah-sekolah lainnya.
2) Peranan PKG dan MGBS/MGMP ditingkatkan.
3) Penelitian tentang hambatan CBSA.

Rekomendasi 6: Peningkatan pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum (MLK) pada tingkat SD.

a. Masalah:

1) Sampai saat ini MLK baru dilaksanakan terbatas pada mata pelajaran yang bersifat monolitik seperti Bahasa Daerah dan Keterampilan. Itupun masih ada sekolah yang tidak melaksanakan.

   Adapun MLK yang bersifat integrated belum terlaksana.
2) Pemahaman guru dan Kepala Sekolah terhadap konsep MLK belum cukup mantap dan masih beraneka ragam.

b. Pemecahan:

1) Perlu dibuat proyek rintisan terbatas dengan memilih sejumlah SD yang baik yang berlokasi di Kabupaten yang memiliki komodite potensial dan marketable, yang dapat dijadikan mudah dari Ujungpandang.

2) Perlu secepatnya dibentuk Tim bersama/gabungan yang terdiri dari unsur Kanwil Dikbud, Pemda, IKIP yang bertugas memkirkan, menggerakkan dan mengkoodinasikan kegiatan rintisan MLK.

3) Diadakan penelitian evaluasi dan studi kelayakan dengan sampel yang cukup luas tentang pelaksanaan MLK.

Rekomendasi 7: Pelaksanaan Pemerataan guru SD dan guru bidang studi SMP.

a. Masalah:

1) Guru-guru kelas pada SD di daerah pedesaan masih kurang, dimana seorang guru kelas masih mengajar/melayani lebih dari satu atau dua kelas. Guru baru enggan ditempatkan di daerah terpencil.

2) Guru bidang studi pada SMP Negeri belum merata sesuai dengan kebutuhan, sehingga banyak guru yang mengajarkan mata pelajaran yang bukan bidang studinya ditampakkan di daerah terpencil dengan akibat proses belajar mengajar yang berkualitas sulit diharapkan terlaksana. Tabel 4).

b. Pemecahan

1) Pemerintah Daerah, Kandep Dikbud dan Dinas P dan K perlu segera mengatur penyebaran guru-guru SD yang bertumpuk pada sekolah-sekolah di Kota Kabupaten atau Kotamadya ke sekolah-sekolah di Kecamatan/Desa yang masih kekurangan guru.

2) Pemda dan Dinas P dan K tingkat Propinsi

   a) Mengusulkan kepada Pemerintah agar bagi tamatan SPG yang bersedia ditempatkan di daerah pedesaan dapat diangkat menjadi guru.

   b) Memprioritaskan alumni D2PGSD yang menandatangani kontrak/tugas di daerah terpencil yaitu segera diangkat pada kesempatan pertama.

3) Kanwil Depdikbud tingkat Propinsi segera mengadakan pemerataan guru bidang studi SMP ke seluruh SMP di Sulawesi Selatan, dari sekolah-sekolah yang berkelebihan kepada sekolah-sekolah yang masih membutuhkan.

4) Konsekwensi dari mutasi guru-guru yang akan dipindahkan ialah perlunya disediakan dana untuk pelaksanaan pemerataan dan penyebaran guru-guru bidang studi (SMP) dan guru-guru SD.

5) Pendataan yang seksama.

Rekomendasi 8: Peningkatan sara dan prasarana serta fasilitas pendidikan di SMP.

a. Masalah:

Laboratorium

1) Laboratorium tidak/kurang berfungsikarena keterabatasan sarana alat, dan fasilitas.
2) Tenaga pengelola lab/laboran tidak ada, dalam pelaksanaan sering dirangkap oleh guru bidang studi yang relevan (biologi dan lain sebagainya).
3) Ada droping alat laboratorium sudah didistribusikan dari pusat tetapi ruang lapboratorium belum ada, sehingga siswa berpraktek di ruang belajar.
4) Sebagaian besar alat/bahan kimia yang didrop dari Pusat sejak Repelita III, IV tidak dapat dipergunakan oleh guru dan hanya tersimpan bertahun-tahun di lemari, karena komponennya tidak lengkap.
5) Sebagian besar ruang laboratorium SMP yang dibangun melalui Proyek PELITA berangsur mulai rusak.
6) Pengelolaan laboratorium tidak intensif karena ditangani oleh tenaga yang tidak dipersiapkan untuk itu.

Ruang Perpustakaan

1) Sebagian besar SMP Negeri belum memiliki ruang perpustakaan yang layak.

2) Buku-buku di perpustakaan sekolah masih sangat minim kebanyakan berupa buku-buku pelajaran (non fiksi) buku yang telah tua. Buku-buku fiksi dan surat kabar/majalah-majalah yang menyangkut pendidikan kurang sekali.

3) Pustakawan yang mengelola perpustakaan kebanyakan diambil dari guru bidang studi.

Ruang BP

Sebagian besar atau 80% dari 444 SMP Negeri tidak memiliki ruang BP yang memadai.

Ruang Osis

Ruang Osis pada sebagaian beesar sekolah tidak ada. Padahal berdasarkan struktur organisasi Osis ruang tersebut harus ada.

b. Pemecahan:

1) Kantor Wilayah Depdikbud diharapkan segera merencanakan dan mengusahakan pengadaan sarana alat, fasilitas dan bahan laboratorium lainnya untuk SMP Negeri yang ada di Sulsel ke Departemen P dan K di Jakarta

2) Kanwil Depdikbud bekerja sama dengan BP3 supaya mengusahakan pembenahan laboratorium IPA, ruang perpustakaan, ruang BP, ruang Osis yang belum ada atau belum lengkap di sekolah-sekolah

Rekomendasi 9: Pembenahan informasi dan dokumentasi

a. Masalah:

Pengisian format penjaringan data belum dilakukan sepenuhnya (misalnya: pemilahan jenis kelamin, penyelesaian target kurikulum dan sebagainya). Pengolahan data menjadi informasi yang siap pakai untuk pengambilan keputusan dan pengkajian belum dilakukan sepenuhnya di bagian perencanaan Kanwil (kurang rinci, kurang lengkap, sering lambat).

b. Pemecahan:

1) Pengisian format-format penjaring data supaya dilakukan secara cermat dan lengkap.

2) Pembinaan staf pada Bagian Perencanaan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

Rekomendasi 10: Peningkatan kelancaran komunikasi dari tingkat Propinsi ke Kecamatan/sekolah dan sebaliknya.

a. Masalah:

Arus komunikasi baik yang berupa informasi biasa, penyebaran kebijakan dan utamanya inovasi belum berjalan dengan lancar.

- Penyampaian informasi biasa (undangan rapat dari Propinsi/Kebupaten).
- Penyebaran kebijakan, juknis-juknis dan juklaknya (SK Menpan no. 26 dan lain-lain).
- Penyebaran inovasi pendidikan (CBSA, Muatan lokal).

b. Pemecahan

1) Diupayakan tersedianya sarana komunikasi kontemporer di Kabupaten dan Kecamatan yang terjangkau oleh kemampuan seperti CB.
2) Naskah-naskah kebijakan juknis dan juklaknya perlu disebarkan dan disertai penyuluhan secara insentif (seperti SK Menpan no. 26, Juknis Mendikbud dan seterusnya)
3) Perlu pelatihan bagi para pengelola dan pelaksana pendidikan di lapangan demi berhasilnya penyebaran informasi pendidikan.

   Di samping itu juga monitoring secara berkesinambungan serta tunjangan biaya.

Rekomendasi 11: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pengelola Kantor Dinas P dan K Dati I/Dati II dalam bidang Administrasi dan Management pendidikan.

a. Masalah

Pengetahuan dan keterampilan (keprofesionalan) para pengelola Kantor Dinas P dan K Dati I/Dati II dalam bidang administrasi dan management pendidikan masih kurang memadai.

b. Pemecahan:

1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pengelola Kantor Dinas P dan K dalam bidang Administrassi management pendidikan melalui penataran, yang diselenggarakan oleh Bappeda Tingkat I.
2) Perlu seminar/temu pendapat secara berkala tentang pelaksanaan administrasi ganda oleh Tim gabungan Bappeda Tingkat I, Kanwil Depdikbud, Dinas P dan K dan Perguruan Tinggi.
3) Pengangkatan para pengelola Kantor Dinas P dan K Dati I/II diseyogyakan dari mereka yang berlatar belakang Administrasi Pendidikan.

Rekomendasi 12: Peningkatan alokasi dana pendidikan SD dan SMP.

a. Masalah:

Dana yang dialokasikan/disubsidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah Dasar (SD) berdasarkan komponen jenis untuk jenis kegiatan yang terdiri dari 10 jenis komponen kegiatan, hanya 5 jenis komponen kegiatan yang disubsidikan, itupun dananya terlalu kecil (misalnya biaya siswa perbulan: Rp 100,-), sedangkan 4 komponen lainnya tidak teralokasi. (Tabel 6).

b. Pemecahan:

1) Kepada Pemda Tingkat I dan II, BAPEDA, dan Dinas P dan K Tingkat Propinsi dan Kabupaten dapat menyusun dan memprogramkan kembali tentang besarnya alokasi anggaransesuai dengan kebutuhan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).
2) Kanwil Depdikbud dengan unit kerja yang terkait, dapat menyusun dan memprogramkan anggaran rutin melalui UKOR-nya lebih obyektif dengan berdasar pada data dan informasi dari sekolah yang lengkap untuk menunjang perencanaan anggaran pendidikan.
3) Dana OPF dan BP2 yang ada di sekolah perlu diteliti penggunaannya secara ketat oleh para Pengawas pendidikan untuk melihat dan meneliti pemanfaatan dana-dana tersebut.

4) Pengurus BP3 yang dibentuk harus anaknya masih bersekolah di sekolah itu.

5) Dana BP3 yang disimpan di Bank harus diketahui oleh Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengawasi sekolah tersebut, karena sebagian besar dana itu adalah dari murid/orangtua yang pembayarannya bersama uang SPP murid, sedangkan kegiatan BP3 seharusnya mencari sumber dana lain, bukan hanya dari siswa yang hakekatnya dari orantua juga.

6) Dana Osis dan dana Pramuka yang merupakan kegiatan siswa harus diketahui dan dimanfaatkan secara jelas dalam program kerja Osis demikian pula dari Pramuka. Pengawasan atas dana-dana ini perlu ditertibkan.

TABEL 1

TAMATAN SD DAN SMTP NEGERI DAN SWASTA YANG LANJUT BELAJAR (1989/90) DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

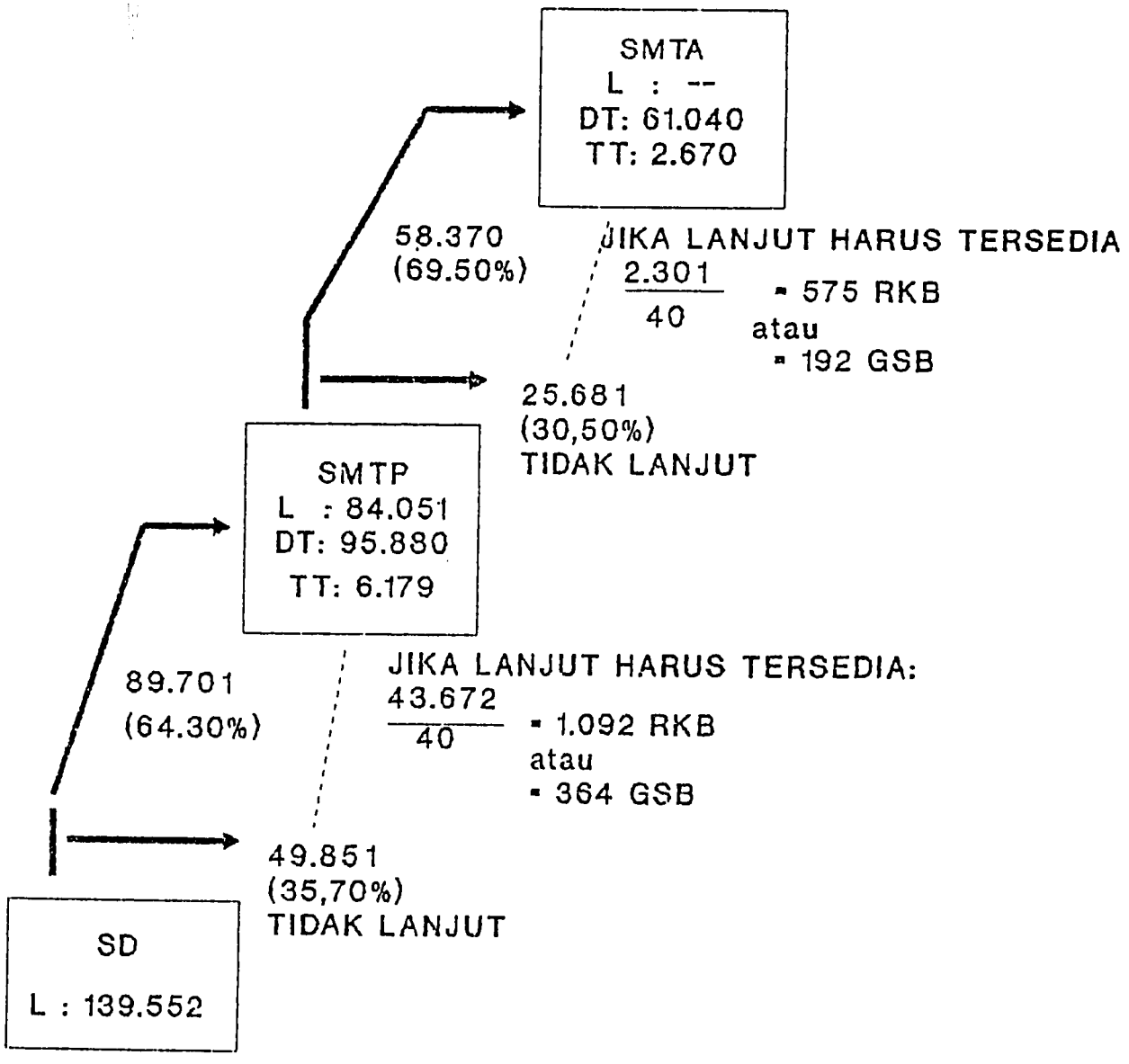

L : Lulusan
DT : Daya Tampung
RKB : Ruang Kelas Baru
GSB : Gedung Sekolah Baru
TT : Tidak Terisi

TABEL 2

STUDENTS AND BOOK RATIO
(Primary and Junior Secondary School)

South Sulawesi

	YEAR	STUDENTS	BOOKS	RATIO
Primary School	1985/1986	1.243.230	1.147.756	18 : 1
	1986/1987	1.241.438	1.341.091	5 : 1
	1988/1989	157.367	4.804	54,8 : 1
	1990/1991	--	--	--
	Average	x 880.685	x 831.243	1:0,050 (20,1)
Junior Second. School	1985/1986	272.651	476.574	10 : 1
	1986/1987	283.600	153.426	31 : 1
	1988/1989	279.126	159.932	31 : 1
	1990/1991	--	--	--
	Average	x 278,459	x 263.310	1:0,052 (19:1)

Source : Table page 23-29 and 49

Note : assuming a book endurance is 3 years

*) there are 10 kinds of student's book

TABEL 3

THE RATIO OF TEACHER'S GUIDE BOOK AND TEACHERS
(Primary and Junior Secondary School)

South Sulawesi

	YEAR	BOOK	TEACHER	RATIO
Primary School	1985/1986	83.934	47.578	1.76
	1986/1987	85.652	51.986	1.64
	1988/1989	4.384	53.649	0.009
	1990/1991	--	--	
	Total			3.409
	Average (Mean)			0.113 *)
	Ratio			8.85 : 1
Junior Second. School	1985/1986	4.843	14.105	0.34
	1986/1987	27.559	15.207	1.81
	1988/1989	5.076	16.786	0.30
	1990/1991	--	--	
	Total			2.45
	Average (Mean)			0.082 *)
	Ratio			12.20 : 1

Source : Table pages 23-29 and 49

Note : assuming a book endurance is 3 years

*) there are 10 kinds of guide's book

TABEL: 4

PEMERATAAN GURU SD DAN SMP
1990/1991

SD		SMP	
Kekurangan:		Kekurangan/Kelebihan:	
Kepsek :	252	K. Semu (-)	4.803
Guru Kelas :	662	Lebih (+)	2.598
Guru Agama :	316		
Guru Orkes :	4.177	K. riil (-)	2.201
Bujang Sek :	2.504		
Penilik :	78	Gr. BP	777
		Bhs. Daerah	500
		PSPB	406
		Seni Musik	346
		Seni Lukis	340
		Seni Suara	264
		Keterampilan kerja	238

TABEL 5 (contoh)

PROPINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : TAKALAR
KECAMATAN : POLONG BANGKENG UTARA
SEKOLAH : S.D. INPRES KALAMPA

ALOKASI/SUBSIDI DANA S.D. INPRES KALAMPA 1990/1991 (PER TRIWULAN)

NOMOR KOMP.	JENIS KEGIATAN	ALOKASI DANA		KETERANGAN
		PER TRIWULAN	PER BULAN	
I	PELAKSANAAN PENDIDIKAN	RP 22.150,-	RP 7.383,-	
II	TATA USAHA	RP 15.000	RP 5.000,-	
III	PEMELIHARAAN SEKOLAH	RP X	RP X	
IV	KESEJAHTERAAN: - PEGAWAI/GURU - BUJANG SEKOLAH	 RP 75.000 RP 7.500	 RP 7500,- RP 2.500	 - 10 ORANG GURU - 1 ORANG
V	PORSENI.....	RP X	RP X	
VI	PENGADAAN BUKU LAPORAN PENDIDIKAN	RP X	RP X	
VII	PENYELENGGARAAN EBTA DAN PENGADAAN STTB	RP X	RP X	
VIII	SUPERVISI PENILIK	RP X	RP X	
IX	PENGELOLAAN DAN LAPORAN	RP 1.250,-	RP 417,-	
X	PEDATAAN.....	RP X	RP X	
	JUMLAH	**RP 120.900**	**RP 22.800.-**	

X = TIDAK ADA BIAYA

GAMBAR 1

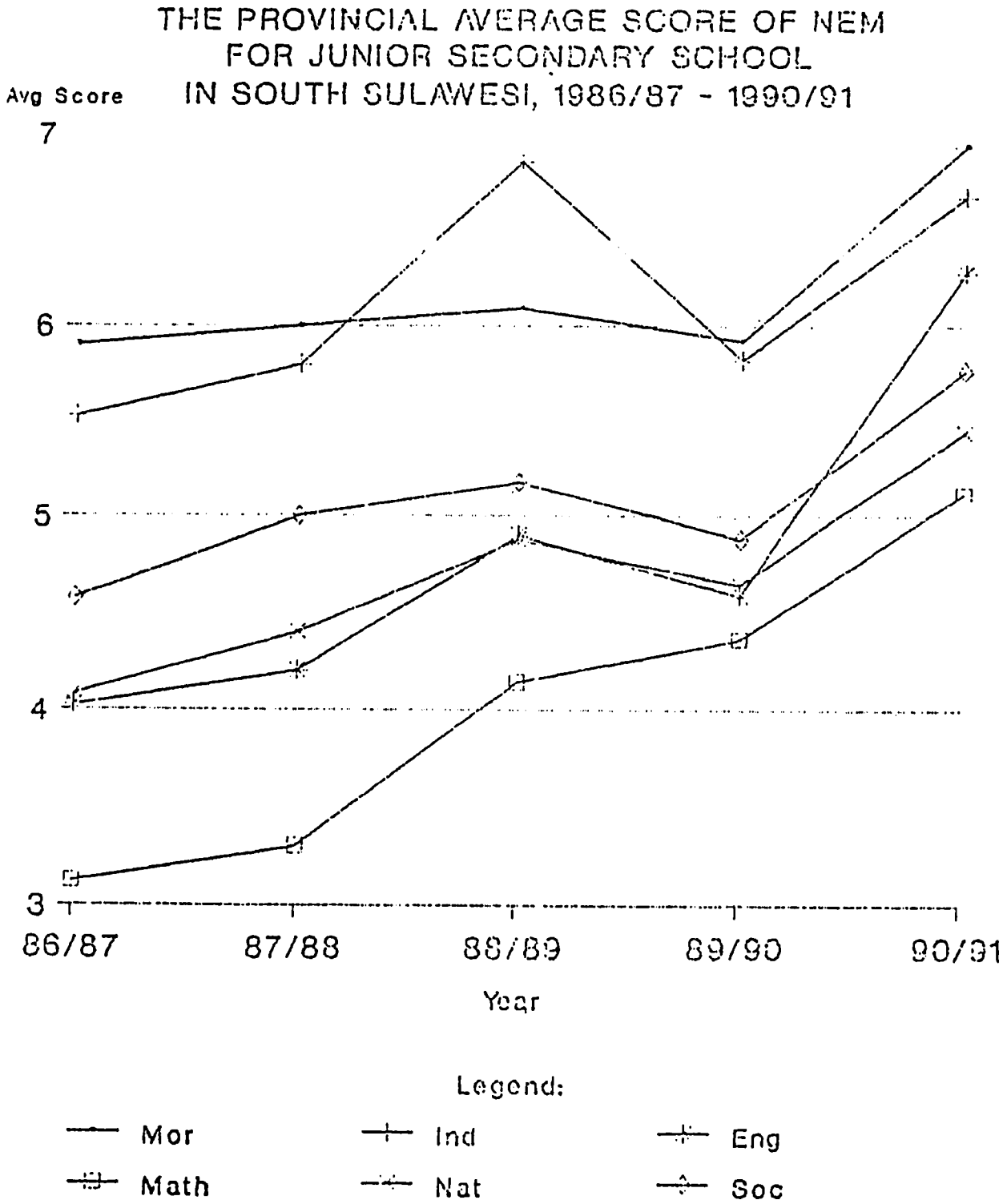

Source: Regional Office of MOEC, South Sulawesi Province.